

## RESPON AMERIKA SERIKAT TERHADAP KEBIJAKAN NATIONAL SWORD TIONGKOK

Kharisma Purnama Sari <sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to describe United States' response towards the National Sword policy implemented in China. This study is a descriptive research type with secondary data source. Then, to explain the research question, author use the concept of Global Waste Trade. This study concludes that the United States' response towards China's National Sword policy is to protest China to the World Trade Organization (WTO) under the reason that China has carry overly strict trade restrictions on waste, utilize other trade partners to purchase its waste as a form of waste diversion in which China no longer import on a massive scale and also to optimise its national waste management by improving waste regulation and single-use plastic usage limitation.*

**Keywords:** *United States' response, National Sword Policy, China*

### Pendahuluan

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang menjadi agenda hubungan internasional karena permasalahan ini dapat mengancam kelangsungan hidup tumbuhan, hewan dan manusia. Salah satu permasalahan lingkungan yang menjadi perhatian adalah permasalahan sampah plastik. Pada tahun 2014, tercatat ada sekitar 269.000 ton plastik di permukaan air di seluruh dunia yang berbentuk mikroplastik kecil hingga makroplastik yang menjadi polusi di lautan ([ourworldindata.org](http://ourworldindata.org), 2018).

Secara umum, pengelolaan sampah plastik global di dunia masih belum efisien yaitu dilakukan dengan cara dibuang dan dibakar. Salah satu cara yang dilakukan untuk menanggulangi atau menangani limbah plastik adalah dengan jual beli limbah untuk tujuan daur ulang atau disebut dengan nama perdagangan limbah global.

Tiongkok merupakan importir sampah plastik terbesar di dunia dengan jumlah impor sebesar 170,5 juta ton metrik dari tahun 1988-2016. Adapun negara-negara yang menjadi mitra dagang terbesar sampah plastik Tiongkok sebagai eksportir di tahun 2016 yaitu Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Australia, dan Kanada ([Hannah Ritchie dan Max Roser, 2018](#)).

Limbah yang diimpor Tiongkok memberikan keuntungan di bidang industri manufaktur karena dapat dijadikan bahan utama pembuatan produk setelah dilakukannya proses daur ulang. Pada tahun 2012, sekitar 58 juta ton produk plastik diproduksi oleh produsen cetakan Tiongkok dengan mencapai nilai penjualan industri manufaktur sebesar 1,65 triliun Yuan ([Statista Research Department, 2020](#)).

Impor sampah yang Tiongkok lakukan selain membawa keuntungan bagi pengusaha sampah ternyata juga membawa dampak buruk bagi lingkungan. Kegiatan pemrosesan limbah yang dikelola secara tidak ramah lingkungan seperti pembakaran limbah impor yang dilakukan secara terbuka menyumbang polusi di Tiongkok serta membahayakan pemilah sampah yang tidak disediakan peralatan keselamatan dan membahayakan kesehatan penduduk yang berada dilingkungan tersebut ([Adam Minter,](#)

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : [kpurnamasari0310@gmail.com](mailto:kpurnamasari0310@gmail.com).

2014). Adapun beberapa wilayah yang menjadi tempat pemilahan sampah impor yaitu Guiyu, Taizhou, Lianjiao, dan Wen'an. Salah satu contoh pencemaran akibat kegiatan pemrosesan limbah impor yang terjadi di Guiyu yaitu ditemukannya air dan sedimen mengandung logam berat tingkat tinggi pada sungai Liangjiang dan Nanyang (Adam Walters dan D. Santillo, 2008).

Gambar 1. Pencemaran Sungai di Guiyu

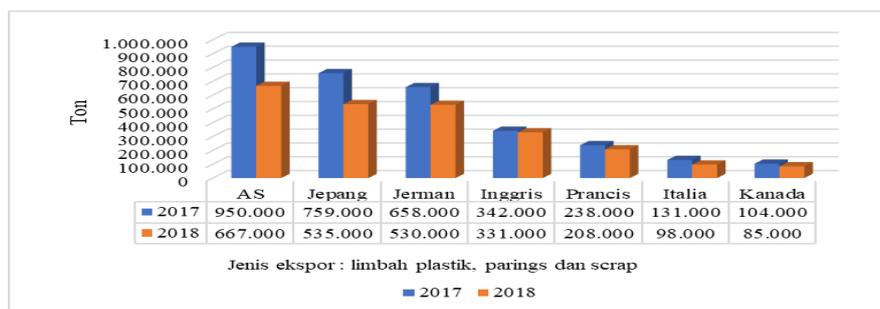


Pengiriman sampah asing yang diimpor Tiongkok selain menyumbang polusi air, udara, dan tanah juga menimbulkan kerugian lain yaitu sampah yang bercampur dengan limbah kotor membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mengolahnya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah Tiongkok mengambil langkah tegas untuk membatasi impor sampah dengan mengeluarkan kebijakan *National Sword*.

*National Sword* merupakan kebijakan Tiongkok dengan melarang impor jenis limbah padat tertentu, serta menetapkan batas kontaminasi ketat pada bahan yang dapat didaur ulang. *National Sword* diumumkan pertama kali pada tanggal 7 Februari 2017 kemudian disusul pengumuman pada 18 Juli 2017 dengan diumumkannya 4 kategori dan 24 jenis sampah yang dilarang. *National Sword* secara resmi dimulai pada 1 Januari 2018. Adapun 4 kategori sampah yang dilarang untuk diimpor oleh pemerintah Tiongkok yaitu sampah plastik harian, *Vanadium Slag* (Terak Vanadium) merupakan ampas dari logam penghasil baja yang debu dan asapnya berbahaya bagi tubuh, kertas limbah yang tidak diklasifikasikan, dan limbah bahan baku tekstil.

Setelah Tiongkok menerapkan kebijakan *National Sword*, sistem daur ulang internasional mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut terjadi pada penurunan jumlah sampah yang dikirim ke Tiongkok dan mempengaruhi upaya daur ulang di negara pengekspor sampah. Selain itu, penurunan ekspor sampah juga terjadi pada pengekspor khususnya di sampah plastik. Adapun negara-negara pengekspor tersebut yaitu AS, Jepang, Italia, Jerman, Kanada, Prancis dan Inggris.

Grafik 1. Penurunan Ekspor Limbah Plastik Tahun 2017-2018



Pada grafik 1 dapat terlihat bahwa AS merupakan negara dengan penurunan ekspor sampah plastik terbesar yaitu 238.000 ton atau sebesar 25%. Pasar ekspor di atas merupakan pasar dunia yang importirnya yaitu Tiongkok, Hongkong, Malaysia, Vietnam, India, Taiwan, Indonesia, Turki, Thailand, *Asia (other)*, Belanda, *Europe (other)*, Americas (other), Afrika, dan Oseania.

Dampak dari kebijakan *National Sword* tidak hanya terjadi pada nilai ekspor tetapi juga berdampak pada program daur ulang AS yang mengalami kerugian karena tidak bisa mengirim sampahnya ke Tiongkok sehingga terjadi penumpukan sampah di kota Westborough dan pembakaran sampah di kota Chester, Pennsylvania dalam jumlah besar yang menimbulkan polusi beracun di lingkungan tersebut. Maka dari itu, AS sebagai negara yang dirugikan akhirnya merespon kebijakan tersebut.

## Kerangka Konseptual

### Konsep *Global Waste Trade*

Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap hubungan internasional dikarenakan meningkatnya hubungan ekonomi, sosial, dan juga budaya terlepas dari batas-batas negara yang ada seperti peningkatan perdagangan internasional. Peningkatan perdagangan antar negara dan banyaknya negara-negara berkembang yang bergabung dengan pasar memicu adanya perdagangan limbah. Berbagai jenis limbah diperdagangkan dari barang yang tidak berbahaya seperti kertas hingga limbah beracun yang dibuang sebagai tempat pembuangan sampah.

Adapun argumen Gille yang mengatakan bahwa limbah sangat mirip dengan sumber daya karena limbah tertentu akan dianggap berharga oleh masyarakat tertentu (Nicky Gregson dan Mike Crang, 2015). Limbah dapat dianggap berharga sesuai dengan penilaian negara ataupun aktor untuk mengolah limbah sebagai bahan produksi sehingga negara yang menganggap adanya potensi dari limbah akan membeli limbah tersebut sedangkan bagi negara yang menganggap limbah lebih banyak menimbulkan hal yang merusak maka negara tersebut memaksimalkan untuk menjualnya ke negara yang ingin membeli maupun memperketat kebijakan lingkungan di negaranya.

Menurut Margaretha et al, dalam perdagangan limbah suatu negara mempunyai hak untuk memberlakukan pelarangan unilateral dengan melarang impor maupun melarang negara lain mengekspor limbah ke negaranya (Margaretha Quina et al, 2019). Walaupun demikian, negara pengekspor masih bisa melakukan perdagangan limbah dengan negara lain yang sudah terikat dengannya dalam perjanjian bilateral maupun multilateral (Lavanya Rajamani dan Jacqueline Peel, 2021). Selain itu, apabila mitra dagang limbah tidak ingin menerima limbah lagi maka negara pengekspor harus mengolah limbahnya dengan meningkatkan kebijakan domestik terkait limbah di negaranya (epa.nsw.gov.au, 2018).

Perdagangan internasional dianggap mempromosikan kemakmuran di antara negara-negara dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka sistem *World Trade Organization* (WTO) menggunakan serangkaian aturan yang dirancang untuk mengurangi hambatan perdagangan dan mempromosikan sistem perdagangan non-diskriminatif antar negara. Pelarangan mengimpor atau mengekspor limbah dapat termasuk dalam pembatasan apabila tidak ada alasan yang mendukung untuk memberlakukan pelarangan tersebut. Pada perjanjian *Technical Barriers to Trade* (TBT) menambahkan persyaratan untuk keabsahan peraturan teknis.

1. Peraturan tidak boleh disiapkan, diadopsi, atau diterapkan dengan maksud atau dengan efek menciptakan hambatan yang tidak perlu bagi perdagangan internasional.
2. Peraturan teknis tidak boleh lebih membatasi perdagangan daripada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang sah, dengan mempertimbangkan risiko yang akan muncul jika tidak terpenuhi (Gideon Emcee Christian, 2017).

Oleh karena itu, semua anggota WTO dapat menyampaikan komentar secara tertulis kepada pembuat kebijakan perdagangan sesuai periode waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa respon yang diambil Amerika Serikat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melakukan perdagangan limbah dengan negara yang terikat dalam perjanjian, mengolah limbahnya sendiri, maupun menyampaikan komentar atas kebijakan perdagangan kepada negara yang melakukan pembatasan perdagangan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif, yaitu menggambarkan tentang respon Amerika Serikat terhadap kebijakan *National Sword* Tiongkok tahun 2018 - 2021. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari hasil interpretasi data primer baik berupa buku sebagai data utama, artikel, jurnal, skripsi dan akses media elektronik. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus mengenai respon yang dimunculkan oleh Amerika Serikat ketika Tiongkok menerapkan kebijakan *National Sword*.

### **Hasil dan Pembahasan**

Reformasi ekonomi pada masa pemerintahan Deng Xiaoping merupakan titik awal impor limbah yang dilakukan Tiongkok. Pengembangan industri manufaktur kecil dengan ekspor sebagai target utama dan gencarnya memproduksi barang membuat Tiongkok memutuskan untuk mengimpor limbah padat.

Perdagangan limbah memang sangat menguntungkan Tiongkok karena limbah lebih murah jika digunakan sebagai bahan baku produksi. Tetapi, impor limbah juga memberikan kerugian bagi Tiongkok yaitu terjadinya pencemaran lingkungan di Guiyu dan Taizhou akibat sampah asing yang tidak dikelola secara ramah lingkungan. Selain itu, Biaya pengolahan limbah bahan baku industri daur ulang menjadi sangat mahal karena pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara pengekspor dengan menyeludupkan limbah kotor atau limbah berbahaya pada kiriman limbah yang diimpor Tiongkok. Adanya kondisi tersebut dan pencemaran atas pengolahan limbah yang buruk menjadi faktor pendorong pemerintah Tiongkok untuk menerapkan kebijakan pembatasan impor atau *National Sword*.

Setelah Tiongkok menerapkan *National Sword*, AS mengalami penurunan ekspor barang bekas ke Tiongkok daratan sebesar 38% yang bernilai \$ 3,5 miliar di tahun 2018 (isri.org, 2019). Jenis komoditas barang bekas Amerika Serikat yang mengalami penurunan yaitu copper scrap dan plastic scrap.

Beberapa limbah yang harusnya dijual ke Tiongkok, telah menjadi sampah yang tertumpuk seperti Ben Harvey dari EL Harvey & Sons yaitu bisnis layanan

pengangkutan sampah yang telah menyimpan 3.000 bal kertas karena tidak dapat dikirim ke Tiongkok (Jason Margolis, 2018). Selain itu, *Waste Dive* sebuah publikasi tentang limbah dan daur ulang mengatakan bahwa kebijakan Tiongkok juga berdampak pada pengolahan limbah yaitu sekitar 60 program daur ulang tepi jalan di AS telah dibatalkan, terjadinya penutupan situs *drop-off* dan batasan material (Cole Rosengren et al, 2019). Adapun beberapa efek atas larangan impor sampah yang dilakukan Tiongkok bagi sampah AS yaitu :

1. Republik Services berhenti menerima plastik dan kertas

Republic Services merupakan perusahaan pembuangan limbah AS yang layanannya mencakup pengumpulan limbah padat tidak berbahaya, pemindahan limbah, pembuangan limbah, daur ulang, dan layanan energi (republicservices.com, 2018). Pada 23 Oktober 2017, Republic Services menginformasikan pada program daur ulangnya tidak lagi menerima plastik campuran (#3-#7) dan kertas campuran. Pembatasan tersebut akan mulai diberlakukan setelah 1 November 2017. Republic Services juga mengatakan bahwa alasan mengatur ulang program daur ulang karena Tiongkok tidak akan menerima plastik campuran mulai tanggal 1 Januari 2018.

2. Pembatasan material di Maui County

Divisi Perlindungan dan Keberlanjutan Lingkungan dari Departemen Manajemen Lingkungan Maui County mengumumkan beberapa perubahan pada program daur ulang. Perubahan tersebut yaitu tidak lagi menerima kertas campuran dan plastik campuran yang akan dimulai pada Januari 2018. Selain itu, juga menginformasikan hanya menerima plastik berlabel #1 dan #2 untuk daur ulang dengan syarat semua bahan harus bersih dari sisa makanan, sabun dan minyak (mauiNOW.com, 2018).

3. Marion County membatasi penerimaan jenis limbah

Program daur ulang tepi jalan Marion County memutuskan pada 5 Maret 2018, tidak akan menerima kertas robek, karton telur, dan sebagian besar wadah plastik (Tracy Loew, 2018). Hal tersebut merupakan tanggapan adanya kebijakan larangan impor Tiongkok. Adapun beberapa barang yang masih bisa diterima dalam perubahan daur ulang Marion County yaitu:

- a. Kertas: koran, karton bergelombang, majalah, katalog, dan kertas kantor.
- b. Serat lainnya: kotak karton bergelombang, kotak sereal, kotak kerupuk, dan kotak sepatu.
- c. Kaleng logam: kaleng baja, timah, dan aluminium.
- d. Plastik bersih: botol minuman berukuran 12 ons atau lebih besar, botol larutan pembersih, dan kendi susu.

Sampah daur ulang yang tidak bisa dikirim ke Tiongkok juga telah beralih dibakar ke insinerasi. Sebanyak 200 ton bahan daur ulang dikirim setiap hari ke insinerator Covanta di Chester City, Pennsylvania sejak berlakunya larangan impor Tiongkok (Oliver Milman, 2019). Pembakaran sampah di Chester menimbulkan sejumlah polutan seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida dan partikel yang akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan apabila terhirup oleh warga. Maka dari itu, AS pun merespon hal tersebut dengan beberapa alternatif cara ataupun mencoba menyesuaikan dengan kebijakan Tiongkok.

### **Protes Amerika Serikat (AS) melalui *World Trade Organization* (WTO)**

Tiongkok merupakan mitra dagang limbah terbesar Amerika Serikat (AS). Tetapi pada tahun 2018, Tiongkok menerapkan *National Sword* yang menimbulkan efek di domestik maupun ekspor bagi AS. Hal tersebut membuat AS meminta Tiongkok tidak menerapkan larangan impor sampah. AS mengirimkan surat pernyataan ke *World Trade Organization* (WTO) dengan alasan bahwa pembatasan tersebut terlalu cepat dan dapat mengakibatkan pengalihan limbah yang pada akhirnya lebih buruk bagi lingkungan. Pernyataan tersebut tertera pada *China - Chinese Environmental Protection Control Standards for Imported Solid Waste AS Raw Materials* dengan simbol dokumen G/TBT/W/468.

Dokumen tersebut berisi pernyataan AS ke *Committee on Technical Barriers to Trade* (TBT) berkaitan tentang penerapan kebijakan larangan impor sampah yang dilakukan Tiongkok. Adapun isi pernyataan AS yang disampaikan pada tanggal 21-22 Maret 2018 dapat dilihat pada lampiran 2 dan dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

1. Amerika Serikat meminta diadakannya pertemuan dengan para ahli dari Departemen Lingkungan Hidup Tiongkok untuk mendiskusikan implementasi pembatasan perdagangan.
2. Amerika Serikat meminta Tiongkok mematuhi jangka waktu normal yakni 60 hari untuk melakukan ulasan, yang mana sesuai dengan Rekomendasi Komite dalam G/TBT/9 Lampiran 3 dan dengan demikian memberikan jangka waktu yang wajar untuk implementasi. Amerika Serikat menemukan bahwa Notifikasi nomor 1211, 1212, dan 1224 hingga 1234 telah diberlakukan jauh sebelum jangka waktu lazim yakni minimum 6 bulan untuk standar-standar teknis dan jauh dari segala interval yang sewajarnya dibutuhkan oleh industri untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi rantai pasokan.
3. Ambang batas 0,5% sangat sulit untuk dipenuhi.
4. Dalam konteks larangan dan standar kontrol impor, terdapat perbedaan antara syarat-syarat yang diberlakukan bagi komoditi asing dan bagi komoditi domestik
5. Amerika Serikat meminta agar Tiongkok segera menghentikan pemberlakuan standar-standar ini dengan melihat kepada pengembangan standar-standar alternatif yang tidak begitu membatasi perdagangan dengan ketat.

Setelah delegasi AS meminta pernyataan tersebut di edarkan, pada 4 Juli 2018 Pemerintah Tiongkok membalas pernyataan AS melalui WTO. Tanggapan pemerintah Tiongkok tertera pada dokumen *China - Chinese Environmental Protection Control Standards for Imported Solid Waste AS Raw Materials* dengan simbol dokumen G/TBT/W/547. Adapun tanggapan pemerintah yaitu *National Sword* upaya Tiongkok mendorong kemajuan di bidang ekologi dan secara pro-aktif mempraktikkan nilai-nilai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan penduduk. Selain itu, Tiongkok menegaskan bahwa setiap negara harus memproses limbahnya sendiri.

Surat pernyataan AS ke *World Trade Organization* (WTO) hanya sebagai wujud protes karena adanya ketidaksesuaian standar dan teknis yang diterapkan oleh Tiongkok. AS memanfaatkan WTO sebagai sarana berkomunikasi agar Tiongkok dapat mempertimbangkan kembali penerapan kebijakan *National Sword* berdasarkan perjanjian TBT. Perjanjian *Technical Barriers to Trade* (TBT) bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian tidak diskriminatif dan tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu untuk perdagangan. Selain itu, perjanjian TBT juga mengakui bahwa negara anggota WTO mempunyai hak

untuk menerapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan kebijakan yang sah, seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia, atau perlindungan lingkungan. Maka dari itu, AS tidak melakukan gugatan ke sidang sengketa sehingga tidak ada hasil dari kasus tersebut dan kebijakan *National Sword* tetap berlanjut sesuai aturan yang ditetapkan Tiongkok.

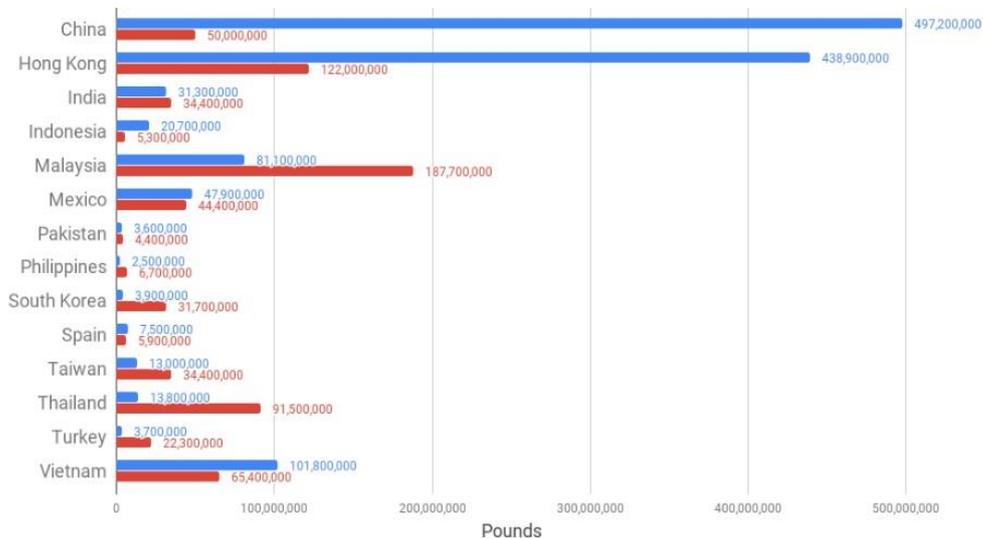
### Pemanfaatan Mitra Perdagangan Sebagai Pengalihan Limbah Amerika Serikat (AS)

Penerapan kebijakan *National Sword* Tiongkok juga berdampak pada perdagangan limbah internasional yakni para eksportir mengalami kesulitan karena tempat tujuan utama ekspor limbah tiba-tiba melakukan pelarangan impor. Walaupun begitu, kebijakan ini membuat Tiongkok mengalami penurunan pada pengiriman limbah yang berasal dari negara lain.

Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu eksportir limbah yang terdampak akibat kebijakan Tiongkok. Contoh dampak tersebut yaitu AS mengalami penurunan ekspor limbah khususnya ke Tiongkok. Pada tahun 2017, AS mengekspor sampah plastiknya ke Tiongkok sebesar 497.200.000 *pounds* sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 50.000.000 *pounds* (Colin Staub, 2018). Maka dari itu, AS mengambil alternatif lain dengan memanfaatkan mitra dagang limbah lainnya sebagai pengganti Tiongkok.

Negara-negara yang menjadi tujuan utama ekspor limbah AS selanjutnya yaitu Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan negara lainnya. Di tahun 2018, Malaysia menjadi negara utama bagi AS untuk mengalihkan sampah plastiknya.

**Grafik 2. Jumlah Sampah AS di Berbagai Negara Tahun 2017 - 2018**



Berdasarkan pada grafik 2, Ekspor AS di beberapa negara mengalami fluktuasi dengan catatan bahwa Malaysia menjadi negara utama bagi AS untuk mengekspor sampahnya sejak *National Sword* diberlakukan. Selain itu, beberapa negara lainnya yang juga mengalami peningkatan yaitu Thailand, Turki, Taiwan, Korea Selatan dan India.

## Memaksimalkan Pengolahan Limbah dalam Negeri

Dampak yang terjadi dari penerapan *National Sword* Tiongkok membuat AS harus melakukan penyesuaian di tingkat domestik dan berupaya menemukan solusi agar tidak terus bergantung pada ekspor. Beberapa dampak yang terjadi pada AS yaitu mengalami penurunan ekspor, penumpukan sampah, Republik Services berhenti menerima plastik dan kertas, pembatasan material di Maui County, Marion County membatasi penerimaan jenis limbah, dan pembakaran sampah berlebih.

Dampak yang ditimbulkan oleh penerapan *National Sword*, ternyata secara tidak langsung menjadi pemicu perubahan yang terjadi pada beberapa wilayah AS dan *Multinational Corporations* (MNC). Pemaksimalan pengolahan limbah oleh wilayah AS dan MNC diartikan dengan cara meminimalisasi terciptanya limbah yang tidak ramah lingkungan, membuat pembatasan penggunaan bahan plastik sekali pakai dan memberikan pendidikan perilaku sadar sampah. Walaupun AS telah memanfaatkan mitra perdagangan limbah selain Tiongkok, tetapi mengurangi terciptanya limbah sangat berguna agar mengurangi penimbunan sampah di AS. Hal tersebut akan menjadi pemicu pemerintah AS menciptakan kebijakan terkait limbah yang akan diawali dari pemerintah lokal untuk membuat peraturan dan selanjutnya mendorong MNC untuk melakukan berbagai penyesuaian dalam bisnis.

### a. Gerakan kesadaran lingkungan di beberapa wilayah Amerika Serikat

#### 1. Kota Seattle

Seattle melarang sedotan dan peralatan plastik sekali pakai dalam layanan makanan di 1 Juli 2018 sebagai bentuk tanggapan terhadap kebijakan *National Sword* yang telah memberikan dampak kepada penurunan ekspor plastik AS. 5000 restoran tersebut diwajibkan untuk menggunakan peralatan yang dapat digunakan kembali atau dapat diolah menjadi kompos ([cdn.oceanactionhub.org](http://cdn.oceanactionhub.org), 2018).

#### 2. Kota San Francisco

Kota San Francisco juga mengikuti langkah yang di ambil kota Seattle sebagai upaya untuk mengurangi penimbunan sampah plastik yang diakibatkan oleh kebijakan *National Sword*. Dewan Pengawas San Francisco memberikan persetujuan terhadap aturan baru yaitu melarang wadah pembawa dan pembungkus yang diolah dari bahan kimia berfluorinasi. Pelarangan penggunaan sedotan plastik, wadah plastik, barang-barang plastik kecil mulai berlaku di San Francisco pada 1 Juli 2019.

#### 3. Kota Los Angeles

Los Angeles merupakan kota California Selatan. Kota ini meningkatkan kembali program pengelolaan sampah berkelanjutan di tahun 2018 di tahun 2018 karena adanya efek yang terjadi di AS akibat larangan impor sampah Tiongkok. *The County of Los Angeles Board of Supervisors* mengadopsi *Roadmap to a Sustainable Waste Management Future 2014* yang akan diterapkan pada Oktober 2018 - Oktober 2019. *Roadmap* tersebut berisi strategi dan inisiatif untuk memaksimalkan pemulihan produk, bahan, dan energi dari limbah.

**b. Gerakan Kesadaran Lingkungan MNC di Amerika Serikat****1. Bon Appetit Management Company**

*Bon Appetit Management Company* adalah perusahaan restoran di tempat yang menawarkan manajemen layanan makan lengkap untuk perusahaan, universitas, museum, dan tempat khusus lainnya. *Bon Appetit Management Company* yang bertempat di kota Palo Alto, California telah menyediakan restoran di kampus-kampus besar AS tersebut berencana akan melarang pemakaian sedotan dan pengaduk plastik di 1000 kafe yang tersebar di 33 negara bagian (Zlati Meyer, 2018).

Beberapa upaya yang dilakukan *Bon Appetit* sebagai langkah pengurangan pemakaian plastik yaitu peralihan pembelian sedotan plastik dan pengaduk plastik digantikan dengan membeli 9,1 juta pengaduk kayu dan menawarkan sedotan kertas kepada pelanggannya. Selain itu, *Bon Appetit Management Company* mengumumkan akan melarang sedotan dan pengaduk plastik dari semua restorannya yang dimulai pada September 2019.

**2. The Coca Cola Company**

*The Coca Cola Company* adalah perusahaan multinasional Amerika dalam bidang minuman yang bertempat di Atlanta, Georgia. Pada tahun 2018, *The Coca Cola Company* meluncurkan program *World Without Waste* yang berfokus pada masalah sampah kemasan dunia.

**3. Alaska Airlines**

*Alaska Airlines* menjadi maskapai penerbangan AS pertama yang melarang sedotan plastik sekali pakai dan stik pengaduk berbahan plastik yang dimulai pada 16 Juli 2018. Maskapai berencana akan mengganti peralatan berbahan plastik dengan sertifikasi *Forest Stewardship Council* (FSC). Adapun barang tersebut yaitu batang pengaduk birch putih, stik bambu dan sedotan non-plastik yang aman untuk laut akan tersedia berdasarkan permintaan. Selain itu, *Alaska Airlines* juga mengganti kotak jus aseptik dengan kaleng aluminium yang lebih mudah di daur ulang (Katherine Lagrave, 2018).

**c. The Break Free from Plastic Pollution Act of 2020**

*The Break Free from Plastic Pollution Act* merupakan undang-undang yang menetapkan persyaratan terkait dengan sistem pengumpulan limbah dan daur ulang untuk berbagai produk dan bahan, termasuk plastik. Undang-undang ini diusulkan oleh senator Udall dan perwakilan Lowenthal ke kongres AS. Undang-undang tersebut membuat produsen produk tertentu (kemasan, kertas, produk sekali pakai, wadah minuman, atau produk layanan makanan) agar bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendaur ulang atau membuat kompos produk setelah digunakan oleh konsumen. Selain itu, undang-undang tersebut menetapkan (1) persentase minimum produk yang harus digunakan kembali, didaur ulang, atau dibuat kompos; dan (2) meningkatnya persentase kandungan daur ulang yang harus ditampung dalam wadah minuman.

**d. Recycle Act**

Pada 23 Maret 2021, UU Recycle diperkenalkan oleh senator Rob Portman di senat. RUU ini memberikan dukungan untuk program daur ulang. Secara khusus, RUU tersebut mengharuskan *United States Environmental Protection Agency* (EPA) untuk membuat program pemberian hibah untuk meningkatkan efektivitas

program daur ulang perumahan dan masyarakat melalui pendidikan dan penjangkauan publik. Selain itu, EPA harus mengembangkan model perangkat program daur ulang untuk negara bagian, suku asli Amerika, dan pemerintah lokal. RUU tersebut menetapkan bahwa tinjauan EPA terhadap pedoman pengadaan federal untuk pembelian bahan daur ulang tertentu dan barang-barang yang dibuat dengan bahan tersebut harus terjadi setidaknya setiap lima tahun sekali.

### **Kesimpulan**

Adanya kebijakan pelarangan impor sampah yang diterapkan oleh Tiongkok didasarkan atas keprihatinan kondisi lingkungan dan dampak dari pengolahan limbah yang buruk, membuat Tiongkok memberlakukan *National Sword Policy*. Kebijakan Tiongkok tersebut membawa dampak yang signifikan bagi para pengeksportir limbah yang selama ini bergantung pada Tiongkok untuk urusan sampahnya. Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu mitra Tiongkok dalam perdagangan limbah ikut merasakan dampak karena adanya kebijakan pelarangan impor sampah. Atas kerugian yang dirasakan maka AS merespon pemberlakuan kebijakan *National Sword* Tiongkok dengan beberapa cara yaitu:

1. Pada 21-22 Maret 2018, AS mengajukan protes melalui *World Trade Organization* (WTO) atas pembatasan perdagangan yang dilakukan Tiongkok dengan alasan bahwa pembatasan tersebut terlalu cepat dan dapat mengakibatkan pengalihan limbah yang pada akhirnya lebih buruk bagi lingkungan.
2. Dalam perdagangan limbah, AS memanfaatkan mitra dagang limbah yang telah memiliki kerjasama bilateral maupun multilateral dengannya. Pada awalnya Tiongkok menjadi mitra utama AS selaku pengimpor limbah terbesar tetapi pada tahun 2018 Malaysia menggantikan posisi Tiongkok sebagai importir utama limbah AS.
3. Peningkatan peraturan limbah dan pembatasan penggunaan bahan plastik sekali pakai oleh beberapa MNC, beberapa wilayah AS dan Pemerintah AS.

### **Daftar Pustaka**

- Alaska Airlines Ditches Plastic Straws on All Flights*, tersedia di <https://www.cntraveler.com/story/alaska-airlines-ditches-plastic-straws-on-all-flights>, diakses pada tanggal 2 Januari 2022
- Christian, G. E., 2017, *Trade Measures for Regulating Transboundary Movement of Electronic Waste*, Utrecht Journal of International and European Law.
- Big food-service outfit banning plastic straws at more than 1,000 U.S. eateries*, tersedia di <https://www.usatoday.com/story/money/2018/05/31/plastic-straws-banned-eateries/657172002/>, diakses pada tanggal 1 Januari 2022
- China: production of plastic products by month 2018-2019*, tersedia di [https://www.laplastic.com/mobile/blog\\_show/24.html](https://www.laplastic.com/mobile/blog_show/24.html), diakses pada tanggal 23 Juni 2019

*Export market roundup: Vietnam bans e-plastic imports*, tersedia di <https://resource-recycling.com/e-scrap/2018/12/06/export-market-roundup-vietnam-bans-e-plastic-imports/> diakses pada tanggal 7 Agustus 2022

Gregson, N and Mike C, 2015, *From waste to Resource: The Trade in Wasters and Global Recycling Economies*, Department of Geography, Durham University: United Kingdom.

*How recycling has changed in all 50 states*, tersedia di <https://www.wastedive.com/news/what-chinese-import-policies-mean-for-all-50-states/510751/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022

Marion County scales back on items accepted with mixed recycling, tersedia di <https://www.statesmanjournal.com/story/tech/science/environment/2018/03/02/marion-county-recycling-changes-go-into-trash/386309002/>, diakses pada tanggal 14 Juli 2022

*'Moment of reckoning': US cities burn recyclables after China bans imports*, tersedia di <https://www.theguardian.com/cities/2019/feb/21/philadelphia-covanta-incinerator-recyclables-china-ban-imports>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022

*Operation Green Fence is deeply affecting export markets*, tersedia di <https://resource-recycling.com/recycling/2013/04/12/operation-green-fence-is-deeply-affecting-export-markets/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022

*Plastic Pollution*, tersedia di [ourworldindata.org/plastic-pollution](http://ourworldindata.org/plastic-pollution), diakses pada tanggal 7 Maret 2021

*Plastic, poverty and pollution in China's recycling dead zone* tersedia di <https://amp.theguardian.com/lifeandstyle/2014/jul/16/plastic-poverty-pollution-china-recycling-dead-zone>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021

Quina, M dkk, 2019, *Kerangka Hukum Perdagangan Limbah Plastik: Pengaturan Global dan Nasional*, ICEL: Jakarta.

Rajamani, L and Jacqueline Peel, 2021, *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, CPI Group (UK) Ltd: United Kingdom.

*Response to the enforcement of the China National Sword Policy*, tersedia di <https://www.epa.nsw.gov.au/your-environment/recycling-and-reuse/response-to-china-national-sword>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022

*Seattle Becomes First U.S. City Ban Plastic Utensils and Straws*, tersedia di <http://cdn.oceanactionhub.org/seattle-becomes-first-us-city-ban-plastic-utensils-and-straws>, diakses pada tanggal 3 Januari 2022

*US Scrap Exports Up 13% in 2018 to \$20.3 Billion*, tersedia di [https://www.isri.org/news-publications/news-details/2019/03/15/u.s.-scrap-exports-up-13-in-2018-to-\\$20.3-billion](https://www.isri.org/news-publications/news-details/2019/03/15/u.s.-scrap-exports-up-13-in-2018-to-$20.3-billion), diakses pada tanggal 15 Desember 2021

Walters, A & D. Santillo, 2008, *Evidence of Environmental and Health Impacts of Electronics Recycling in China: an update*, Greenpeace International.